

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan**

Menurut Sanjaya dan Wirawati (2016) teori keagenan (*Agency Theory*) adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan prinsipal sebagai pihak pemilik, keduanya terikat dalam sebuah kontrak. Pemilik atau prinsipal adalah sebagai pihak yang melakukan evaluasi terhadap informasi yang berkaitan dengan perusahaan dan agen adalah sebagai pihak yang menjalankan kegiatan manajemen dan mengambil keputusan (Sanjaya dan Wirawati, 2016).

Dalam teori keagenan pemisahan tugas dan fungsi ini dapat menimbulkan konflik keagenan diantara principal dan agen. Masalah keagenan dapat memunculkan adanya biaya agensi seperti biaya untuk melakukan pengawasan terhadap agen oleh principal, biaya penjaminan bahwa agen tidak akan bertindak merugikan prinsipal dan penurunan tingkat utilitas prinsipal maupun agen karena adanya hubungan agensi. Dalam membuat keputusan untuk mengungkapkan informasi sosial, perusahaan akan mengikuti suatu pengeluaran untuk pengungkapan yang akan menurunkan pendapatan sehingga sesuai dengan teori agensi maka perusahaan yang mempunyai *leverage* yang tinggi akan mengurangi pengungkapan *corporate social responsibility* untuk menghindari sorotan dari debtholder.

##### **2.1.2 Teori Stakeholderr**

Dalam teori *stakeholder*, Perusahaan tidak hanya sekedar bertanggung jawab terhadap pemilik (*shareholder*) sebagaimana terjadi selama ini, namun bergeser menjadi lebih luas yaitu sampai pada ranah sosial kemasyarakatan (*stakeholder*) yang juga disebut sebagai tanggungjawab sosial (*social responsibility*) (Barnas dkk, 2016). Dari teori *stakeholder* ini, perusahaan perlu menjaga hubungan dalam stakeholder karena stakeholder dapat mengendalikan sumber-sumber ekonomi yang di butuhkan

perusahaan. Maka dari itu, perusahaan akan melakukan sesuatu yang bisa memuaskan keinginan stakeholder.

Perusahaan dapat menjaga hubungan dengan *stakeholder* dengan memberikan manfaat untuk *stakeholder* melalui program *corporate social responsibility*. Dari program tersebut perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan, pelanggan dan masyarakat. Sehingga diharapkan terjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan lingkungan sekitar.

### **2.1.3 Teori Legitimasi**

Teori legitimasi ialah hubungan dua arah antara perusahaan dan masyarakat. Dasar dari hal tersebut ialah pandangan yang menyatakan bahwa perusahaan selalu berusaha menciptakan keharmonisan dan keselarasan antara nilai sosial dalam aktivitasnya dan norma yang berlaku dalam sistem sosial masyarakat bahwa perusahaan menjadi bagian dari sistem tersebut (Purwanto, 2011). Menurut Ghazali dan Chariri (2007) menjelaskan bahwa teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi, karena teori legitimasi adalah hal yang paling penting bagi organisasi. Batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial serta reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan.

Legitimasi perusahaan dilihat dari upaya perusahaan dalam menaati norma-norma yang berlaku di masyarakat, tempat perusahaan beroperasi sehingga operasional perusahaan dapat berjalan tanpa menimbulkan konflik dengan masyarakat sekitar perusahaan. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan perusahaan yaitu dengan memberikan sesuatu yang dapat memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan dengan cara mengembangkan program *corporate social responsibility*. Dengan program tersebut diharapkan dapat menciptakan keharmonisan antara perusahaan dengan masyarakat.

### **2.1.4 Kinerja Keuangan Perusahaan**

Kinerja keuangan ialah gambaran keadaan keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu baik yang menyangkut aspek penghimpunan

dana ataupun penyaluran dana, biasanya diukur menggunakan indikator kecukupan modal, likuiditas, serta profitabilitas (Ruang Guru, 2019). Kinerja keuangan yang diukur menggunakan indikator profitabilitas dapat dihitung melalui rasio Return On Aset (ROA). Melalui rasio ROA, pengukuran kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dari kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang didasarkan pada tingkat aktiva tertentu yang dimiliki atau upaya untuk menghasilkan keuntungan dari setiap rupiah aktiva yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA sebuah perusahaan maka semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam mengelola asset yang dimiliki.

Suatu perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik sebaiknya melakukan corporate social responsibility dan melakukan pengungkapan pada laporan tahunan yang dibuat. Perusahaan yang melaksanakan pengungkapan corporate social responsibility diharapkan akan meningkatkan simpati masyarakat dan citra baiknya di mata investor, sehingga akhirnya berdampak pada bagaimana perusahaan meningkatkan laba perusahaan. Untuk mengetahui kinerja keuangan melalui ROA dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}}$$

### **2.1.5 Corporate Social Responsibility (CSR)**

Menurut Hadi (2018) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu bentuk tindakan yang bersumber dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan serta keluarganya, dan tentunya peningkatan kualitas masyarakat sekitar secara lebih luas. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas segala kegiatan usaha baik terhadap lingkungan dan sosial yang ada di daerah tempat perusahaan beroperasi maupun secara luas. Pertanggungjawaban sosial perusahaan dapat dilakukan melalui kegiatan

*corporate social responsibility*, melalui kegiatan tersebut diharapkan perhatian terhadap lingkungan dapat terpenuhi, melakukan kegiatan sosial sebagai bentuk investasi dan meningkatkan citra perusahaan di mata publik.

Setiap aktivitas perusahaan akan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Akibatnya dari interaksi itu menuntut adanya timbal balik antara perusahaan dan lingkungan sosialnya yang berimplikasi pada timbulnya dampak-dampak sosial atas kegiatan operasi perusahaan pada lingkungannya. Perusahaan menggunakan sumber manusia dan komunitas yang ada, maka perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan profit dan mengembalikan sebagian profit tersebut bagi masyarakat (Utami, 2011).

#### **2.1.6 Kesehatan Keuangan Perusahaan**

Kesehatan keuangan perusahaan merupakan hasil dari kondisi sehat atau tidak sehatnya perusahaan pada bidang keuangan selama periode penelitian yang diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan dari laporan keuangan. Sejumlah studi telah dilakukan untuk mengetahui kegunaan analisis rasio keuangan dalam memprediksi kegagalan atau kebangkrutan suatu perusahaan. Salah satu studi tentang prediksi ini adalah multiple discriminant analysis (MDA) yang biasa disebut metode Z-Score model Altman. Analisis prediksi kebangkrutan merupakan analisis yang dapat membantu perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan perusahaan akan mengalami kebangkrutan yang disebabkan oleh masalah-masalah keuangan. Metode Z-Score (Altman) adalah skor yang ditentukan dari hitungan standar kali nisbah-nisbah keuangan yang akan menunjukkan tingkat kemungkinan kebangkrutan perusahaan (Supardi, 2003:73).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode Z-Score (Altman) adalah suatu alat yang memperhitungkan dan menggabungkan beberapa rasio-rasio keuangan tertentu dalam perusahaan dalam suatu

persamaan diskriminan yang akan menghasilkan skor tertentu yang akan menunjukkan tingkat kemungkinan kebangkrutan perusahaan. Metode Z-Score (Altman) menggunakan berbagai rasio untuk menciptakan alat prediksi kesulitan. Karakteristik rasio tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan kesulitan keuangan masa depan. Kesulitan keuangan tersebut akan tergambar pada rasio-rasio yang telah diperhitungkan. Terdapat lima rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam metode ini. Rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam metode Z-Score (Altman), salah satu diantaranya dikemukakan oleh Darsono, dkk. (2004:106) di bawah ini.

WCTA (Working capital to total asset atau modal kerja dibagi total aset), RETA (Retained earning to total asset atau laba ditahan dibagi total aktiva), EBITTA (Earning before interest and taxes to total asset atau laba sebelum pajak dan bunga dibagi total aktiva), MVEBVL (Market value of equity to book value of liability atau nilai pasar sekuritas dibagi dengan nilai buku utang), dan STA (Sales to total asset atau penjualan dibagi total aktiva).

Rasio-rasio ini digunakan khusus untuk perusahaan manufaktur yang go public. Perubahan rasio terjadi pada rasio MVEBVL (Market value of equity to book value of liability atau nilai pasar sekuritas dibagi dengan nilai buku utang) menjadi BVEBVL (Book Value of equity to book value of liability atau nilai buku modal dibagi dengan nilai buku utang) yang digunakan untuk perusahaan manufaktur yang tidak go public, karena perusahaan jenis ini tidak memiliki nilai pasar untuk ekuitasnya.

Altman menemukan lima jenis rasio keuangan yang dapat dikombinasikan untuk melihat perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dan yang tidak bangkrut. Z-Score (Altman) ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut yang dikemukakan oleh Darsono, dkk. (2004:105).

$$Z = 1,2 (WCTA) + 1,4 (RETA) + 3,3 (EBITTA) + 0,6 (MVEBVL) + 1 (STA)$$

Perhitungan analisis Z-Score terdiri dari tiga versi, diantaranya versi pada perusahaan manufaktur yang telah go public, perusahaan manufaktur pribadi

yang belum go public, dan perusahaan bukan manufaktur. Formula di atas merupakan versi yang pertama kali dikembangkan oleh Altman khusus untuk perusahaan manufaktur yang go public. Apabila perhitungan metode Z-Score telah dilakukan dengan serangkaian rasio-rasio keuangan yang dimasukkan dalam suatu persamaan diskriminan maka akan menghasilkan suatu angka atau skor tertentu. Angka ini memiliki penjelasan atau interpretasi tertentu.

Dalam model tersebut perusahaan yang mempunyai skor  $Z > 2,99$  diklasifikasikan sebagai perusahaan sehat, sedangkan perusahaan yang mempunyai skor  $Z < 1,81$  diklasifikasikan sebagai perusahaan potensial bangkrut. Selanjutnya skor 1,81 sampai 2,99 diklasifikasikan sebagai perusahaan pada grey area atau daerah kelabu (Muslich, 2000:60).

### **2.1.7 Pengungkapan Corporate Social Responsibility**

Pengungkapan *corporate social responsibility* atau *corporate social disclosure* yaitu proses mengomunikasikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi perusahaan terhadap kelompok yang berkepentingan (Purwanto, 2011). Menurut Mandaika dan Salim(2015) pengungkapan *corporate social responsibility* termasuk mandatory disclosure karena telah diatur dalam perundangan, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bapepam No. VIII G.2 mengenai annual report yang bertujuan melindungi pemilik modal dari asimetri informasi. Terdapat beberapa alasan mengapa perusahaan melakukan pengungkapan *corporate social responsibility*, yaitu:

- a. untuk menarik dana investasi,
- b. atas pertimbangan *economic rationality*, yaitu pengungkapan *corporate social responsibility* dapat memberi keuntungan bisnis,
- c. untuk mematuhi persyaratan industri tertentu,
- d. untuk memenuhi atau menyesuaikan ekspektasi masyarakat.

Standar pengungkapan *corporate social responsibility* yang berkembang di Indonesia saat ini adalah merujuk pada standar yang diterapkan GRI (*Global Reporting Initiative*). Standar GRI ini dipilih karena lebih memfokuskan pada standar pengungkapan sebagai kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan pemanfaatan *sustainability reporting*. Berikut ini item pengukuran GRI *Standards* yang digunakan dalam pengungkapan *corporate social responsibility* penelitian ini.

**Tabel 2.1**  
**Indikator Pengungkapan GRI *Standards***

Item	GRI	Index Pengungkapan
	GRI 100	Pengungkapan Umum
	GRI 102	Pengungkapan Umum
	1	Profil Organisasi
1	102-1	Nama Organisasi
2	102-2	Kegiatan, merk, produk, dan jasa
3	102-3	Lokasi kantor pusat
4	102-4	Lokasi operasi
5	102-5	Kepemilikan dan bentuk hukum
6	102-6	Pasar yang dilayani
7	102-7	Skala organisasi
8	102-8	Informasi mengenai karyawan dan pekerja Lainnya
9	102-9	Rantai pasokan
10	102-10	Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai Pasokannya
11	102-11	Pendekatan atau prinsip pencegahan
12	102-12	Inisiatif eksternal
13	102-13	Keanggotaan asosiasi
	2	Strategi
14	102-14	Pernyataan dari pembuat keputusan senior

15	102-15	Dampak penting, risiko, dan peluang
	3	Etika dan Integritas
16	102-16	Nilai, prinsip, standar, dan normal perilaku
17	102-17	Mekanisme untuk saran dan kekhawatiran tentang etika
	4	Tata Kelola
18	102-18	Struktur tata kelola
19	102-19	Mendelegasikan wewenang
20	102-20	Tanggung jawab tingkat eksekutif untuk topik ekonomi, lingkungan dan social
21	102-21	Berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan mengenai topik-topik ekonomi, lingkungan, dan social
22	102-22	Komposisi badan tata kelola tertinggi dan Komitennya
23	102-23	Ketua badan tata kelola tertinggi
24	102-24	Menominasikan dan memilih badan tata kelola Tertinggi
25	102-25	Konflik kepentingan
26	102-26	Peran badan tata kelola tertinggi dalam menetapkan tujuan, nilai-nilai, dan stratei
27	102-27	Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi
28	102-28	Mengevaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi
29	102-29	Mengidentifikasi dan mengelola dampak ekonomi, lingkungan, dan social

30	102-30	Keefektifan proses manajemen risiko
31	102-31	Pengkajian topik ekonomi, lingkungan, dan Social
32	102-32	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan
33	102-33	Mengomunikasikan hal-hal kritis
34	102-34	Sifat dan jumlah total hal-hal kritis
35	102-35	Kebijakan remunerasi
36	102-36	Proses untuk menentukan remunerasi
37	102-37	Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam Remunerasi

38	102-38	Rasio kompensasi total tahunan
39	102-39	Persentase kenaikan dalam total rasio kompensasi total tahunan
	5	Keterlibatan Pemangku Kepentingan
40	102-40	Daftar kelompok pemangku kepentingan
41	102-41	Perjanjian perundingan kolektif
42	102-42	Mengidentifikasi dan memilih pemangku Kepentingan
43	102-43	Pendekatan untuk keterlibatan pemangku Kepentingan
44	102-44	Topik utama dan masalah yang dikemukakan
	6	Praktik Pelaporan
45	102-45	Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan Dikonsolidasi
46	102-46	Menetapkan isi laporan dan batasan topic
47	102-47	Daftar topik material
48	102-48	Penyajian kembali informasi
49	102-49	Perubahan dalam pelaporan
50	102-50	Periode pelaporan
51	102-51	Tanggal laporan terbaru
52	102-52	Siklus pelaporan
53	102-53	Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan
54	102-54	Mengklaim pelaporan sesuai dengan Standar GRI

55	102-55	Indeks isi GRI
56	102-56	Assurance oleh pihak eksternal
	103	Pendekatan Manajemen
	1	Persyaratan Umum untuk Pelaporan Pendekatan Manajemen
57	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya
58	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya
59	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen
	GRI 200	Topik Ekonomi

	GRI 201	Kinerja Ekonomi
60	201-1	Nilai Ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
61	201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim
62	201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya
63	201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah
	GRI 202	Keberadaan Pasar
64	202-1	Rasio standar upah karyawan entry level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional
65	202-2	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat local
	GRI 203	Dampak Ekonomi Tidak Langsung
66	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan
67	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan
	GRI 204	Praktik Pengadaan
68	-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok local
	GRI 205	Anti-Korupsi
69	205-1	Operasi-operasi yang di nilai memiliki risiko terkait korupsi
70	205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi
71	205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan sinyal yang diambil
	GRI 206	Perilaku Anti-Persaingan

72	206-1	Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti-persaingan, praktik anti-trust dan monopoli
	GRI 300	Topik Lingkungan
	GRI 301	Material
73	301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume
74	301-2	Material input dari daur ulang yang digunakan
75	301-3	Produk reclaimed dan material kemasannya
	GRI 302	Energi

76	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi
77	302-2	Konsumsi energi di luar organisasi
78	302-3	Intensitas energy
79	302-4	Pengurangan konsumsi energy
80	302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa
	GRI 303	Air
81	303-1	Pengambilan air berdasarkan sumber
82	303-2	Sumber air secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air
83	303-3	Daur ulang dan penggunaan air kembali
	GRI 304	Keanekaragaman Hayati
84	304-1	Lokal operasional yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung
85	304-2	Dampak signifikan dari kegiatan, produk dan jasa pada keanekaragaman hayati
86	304-3	Habitat yang dilindungi dan direstorasi
87	304-4	Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat wilayah yang terkena efek operasi
	GRI 305	Emisi
88	305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung
89	305-2	Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung
90	305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya
91	305-4	Intensitas emisi GRK
92	305-5	Penurunan emisi GRK
93	305-6	Emisi zat perusak ozon (ODS)
94	305-7	Nitrogen oksida (Nox), sulfur oksida (Sox), dan emisi udara yan signifikan lainnya
	GRI 306	Air Limbah (Efluen) dan Limbah
95	306-1	Pelepasan air berdasarkan kualitas dan tujuan
96	306-2	Limbah berdasarkan jenis dan metode Pembuangan

97	306-3	Tumpah yang signifikan
98	306-4	Pengangkutan limbah berbahaya
99	306-5	Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau limbah air
	GRI 307	Kepatuhan Lingkungan
100	307-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup
	GRI 308	Penilaian Lingkungan Pemasok
101	308-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan
102	308-2	Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
	GRI 400	Topik Sosial
	GRI 401	Kepegawaian
103	401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan
104	401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu
105	401-3	Cuti melahirkan
	GRI 402	Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen
106	402-1	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional
	GRI 403	Kesehatan dan Keselamatan Kerja
107	403-1	Perwakilan pekerja dalam komite resmi gabungan manajemen-pekerja untuk kesehatan dan keselamatan
108	403-2	Jenis kecelakaan kerja dan tingkat kecelakaan kerja, penyakit akibat pekerjaan, hari kerja yang hilang, dan ketidakhadiran, serta jumlah kematian terkait pekerjaan

109	403-3	Para pekerja dengan risiko kecelakaan atau penyakit berbahaya tinggi terkait dengan pekerjaan mereka
110	403-4	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat buruh
	GRI 404	Pelatihan dan Pendidikan

111	404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan
112	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan
113	404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier
	GRI 405	Keanekaragaman dan Kesempatan Setara
114	405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan Karyawan
115	405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki
	GRI 406	Non-Diskriminasi
116	406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan
	GRI 407	Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Kolektif
117	407-1	Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin beresiko
	GRI 408	Pekerja Anak
118	408-1	Operasi dan pemasok yang beresiko signifikan terhadap insiden pekerja anak
	GRI 409	Kerja Paksa atau Wajib Kerja
119	409-1	Operasi dan pemasok yang beresiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja
	GRI 410	Praktik Keamanan
120	410-1	Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia
	GRI 411	Hak-hak Masyarakat Adat
121	411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat
	GRI 412	Penilaian Hak Asasi Manusia
122	412-1	Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak
123	412-2	Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia
124	412-3	Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi Manusia
	GRI 413	Masyarakat Lokal

125	413-1	Operasi dengan ketertiban masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan
126	413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal
	GRI 414	Penilaian Sosial Pemasok
127	414-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria social
128	414-2	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
	GRI 415	Kebijakan Publik
129	415-1	Kontribusi politik
	GRI 416	Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan
130	416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa
131	416-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa
	GRI 417	Pemasaran dan Pelabelan
132	417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa
133	417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait pelabelan dan informasi produk dan jasa
134	417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi Pemasaran
	GRI 418	Privasi Pelanggan
135	418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data Pelanggan
	GRI 419	Kepatuhan Sosial Ekonomi
136	419-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi

Sumber: GRI Standards

## 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian terdahulu telah dilakukan diantaranya Mandaika dan Salim (2015) menguji tentang pengaruh ukuran perusahaan, kinerja keuangan, tipe industri dan *financial leverage* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* menggunakan data 96 sampel perusahaan manufaktur yang

listing di Bursa Efek Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, kinerja keuangan, tipe industri dan *financial leverage*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, kinerja keuangan dan *financial leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* sedangkan tipe industri memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Penelitian yang dilakukan oleh Barnas dkk (2016) menguji tentang pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* menggunakan data 33 sampel perusahaan makanan dan minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah *corporate social responsibility*, profitabilitas dan ukuran perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*

Penelitian Yanti dan Budiasih (2016) menguji tentang pengaruh profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* menggunakan data 105 sampel perusahaan pertambangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah *corporate social responsibility*, profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada pengungkapan *corporate social responsibility*.

Penelitian Sunaryo dan Mahfud (2016) menguji tentang pengaruh size, profitabilitas, leverage dan umur terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menggunakan data 300 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah *corporate social responsibility*, size, profitabilitas, leverage dan

umur perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel leverage berpengaruh negatif pada pengungkapan corporate social responsibility, variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Sedangkan variabel size perusahaan dan umur perusahaan tidak berpengaruh pada pengungkapan corporate social responsibility

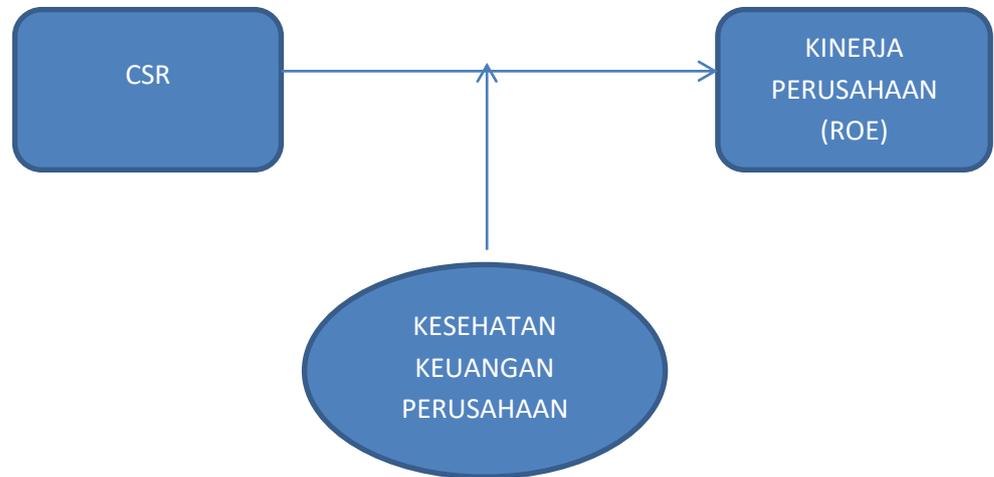
Penelitian Wahyuningsih dan Mahdar (2018) menguji tentang pengaruh *size*, *leverage*, dan profitabilitas terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* menggunakan data 64 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah *corporate social responsibility*, *size*, profitabilitas dan *leverage*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *size* dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* sedangkan *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Penelitian Erviana dkk (2018) menguji tentang pengaruh leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan dan kepemilikan saham public terhadap kebijakan pengungkapan tanggungjawab sosial dan lingkungan menggunakan data 25 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah *corporate social responsibility*, *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan saham publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *leverage* dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sedangkan ukuran perusahaan dan kepemilikan saham publik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

### **2.3 Model Konseptual Penelitian**

Penelitian ini akan menguji Pengaruh CSR terhadap Kinerja Keuangan perusahaan yang dimoderasi oleh kesehatan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI yang akan dijelaskan pada gambar berikut ini:

**Gambar 2.1 Model Kerangka Konseptual**



Gambar di atas adalah hasil visualisasi logika hubungan antar variabel-variabel penelitian ini. Terdapat satu variabel pemoderasi yang mengarah kehubungan CSR dengan kinerja keuangan yang diwakili garis lurus. Terdapat satu variabel independen yaitu CSR yang mengarah pada kinerja keuangan sebagai variabel dependen yang juga diwakili garis lurus. Hal tersebut menandakan adanya pengaruh dan membentuk hipotesis dalam penelitian ini.

## **2.4 Pengembangan Hipotesis**

### **2.4.1 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan**

Dengan adanya kebijakan mengenai kegiatan CSR, manajer berkeinginan untuk perusahaan mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Sesuai dengan teori legitimasi yang menegaskan bahwa perusahaan terus berupaya untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang ada dalam masyarakat atau lingkungan dimana perusahaan berada, dimana mereka berusaha untuk memastikan bahwa aktifitas mereka diterima oleh pihak luar sebagai suatu yang “sah”.

Selain legitimasi, aktivitas CSR sangat membantu dalam membangun sebuah citra positif diantara para *stakeholder* (Orlitzky, Schmidt dan Rynes,

2003). Citra positif ini dapat meningkatkan reputasi perusahaan di pasar modal karena dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menegosiasikan kontrak yang menarik dengan *suppliers* dan pemerintah, menetapkan premium prices terhadap barang dan jasa, dan mengurangi biaya modal (Fombrun *et al.*, 2000) sehingga perusahaan mendapatkan peraturan pemerintah yang lebih menguntungkan serta pengawasan yang tidak terlalu ketat dari investor dan karyawan.

Sesuai dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa semua terlibat dalam pengungkapan kinerja perusahaan, semakin baik perusahaan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan maka investor akan mengetahui informasi tentang kepedulian perusahaan terkait dengan lingkungan (Ajilaksana, 2011). Kondisi perusahaan yang terkait lingkungan akan menjadi lebih baik di masa datang dan perusahaan bersedia menambah investasinya sehingga membuat nilai pasar perusahaan menjadi lebih baik (Ajilaksana, 2011).

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, hipotesis pertama yang diajukan

dalam penelitian ini adalah:

**H1: Aktivitas CSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.**

#### **2.4.2 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Kesehatan Keuangan Perusahaan sebagai Variabel Pemoderasi**

Sejumlah studi telah dilakukan untuk mengetahui kegunaan analisis rasio keuangan dalam memprediksi kegagalan atau kebangkrutan suatu perusahaan. Salah satu studi tentang prediksi ini adalah multiple discriminan analysis (MDA) yang biasa disebut metode Z-Score model Altman.

Kebangkrutan perusahaan merupakan "kesulitan keuangan perusahaan dimana kondisi yang dimulai ketika perusahaan tidak bisa memenuhi pembayaran

atau ketika proyeksi arus kas menunjukkan bahwa perusahaan tersebut akan segera tidak bisa memenuhi kewajibannya, Kebangkrutan mengacu pada posisi kekayaan bersih dari suatu perusahaan, atau putusan pengadilan yang mengarah dan memutuskan apakah perusahaan tersebut akan di likuidasi atau reorganisasi" (Brigham & Houston, 2013). Kondisi tersebut secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap penurunan kinerja perusahaan dan dapat menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan

Model yang sering digunakan dalam menganalisis kebangkrutan adalah model Z-score Altman. Model Altman ini merupakan suatu model analisis keuangan yang telah banyak digunakan di Amerika Serikat oleh Edward I Altman seorang ekonom keuangan di AS. Menurut (Altman, 1968), dalam penelitiannya menentukan lima rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mendeteksi kebangkrutan perusahaan beberapa saat sebelum perusahaan tersebut bangkrut. Kelima rasio tersebut terdiri dari : modal kerja terhadap aktiva, laba ditahan terhadap total aktiva, laba sebelum bunga dan pajak terhadap aktiva, nilai pasar modal saham terhadap nilai buku hutang, dan penjualan terhadap aktiva. Analisis tersebut dikenal dengan analisis Z-Score yang dapat memprediksi secara tepat tentang kinerja perusahaan, serta kemungkinan kondisi kesehatan keuangan di masa yang akan datang, apakah perusahaan mengalami kebangkrutan, rawan bangkrut, atau dalam keadaan sehat. Berdasarkan uraian tersebut dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

**H2: Semakin tinggi tingkat kesehatan keuangan perusahaan, maka berpengaruh positif terhadap hubungan antara CSR dan kinerja keuangan perusahaan.**

